

STRATEGI DAN DAMPAK PEMBANGUNAN KAWASAN PLBN ENTIKONG DALAM MENINGKATKAN PERDAGANGAN DAN KEAMANAN WILAYAH INDONESIA

Maisondra¹

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

[1maisondra@ipdn.ac.id](mailto:maisondra@ipdn.ac.id)

Abstrack

The purpose of this study is to determine the impact arising from the development of the Entikong Cross-border Post area on trade and security in the Indonesian territory and to find out suitable strategies to be developed in the development of the Entikong Cross-border Post area so that it impacts on trade and security in the Indonesian territory. This type of research is descriptive qualitative, which focuses on the impact arising from the development of the Entikong Cross-border Post area on trade and security in Indonesia and suitable strategies to be applied in the future development of the region. Data is collected through nonparticipant observation, interviews and documentation. The data validity checking technique uses triangulation. While the techniques of data analysis through the steps of data reduction, data exposure, data interpretation and drawing conclusions. The findings of this study indicate that the development of the Entikong Cross-border Post Zone has an impact on increasing legal trade and the security situation, but the impact has not significantly affected the economic improvement and welfare of the surrounding communities. Physical development in the form of a Trans-National Post Office and a number of other infrastructures is a very appropriate strategy, but must be followed by the development of human resources and other local wisdom.

Keywords: Strategy, Impact, Trade, Security

PENDAHULUAN

Entikong adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat, Indonesia yang memiliki jalur perbatasan darat dengan negara tetangga Malaysia. Hal ini menjadikan daerah perbatasan ini sebagai pintu untuk memasukan dan mengeluarkan barang-barang serta orang, termasuk para TKI yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Jalur perbatasan Entikong yang memiliki sejumlah jalan tikus sering dipergunakan untuk berbagai

penyeludupan, baik penyeludupan barang maupun penyeludupan manusia, bahkan juga penyeludupan narkoba dan obat-obat terlarang. Wilayah Entikongpun menjadi cukup ramai sebagai tempat transit dan istirahat bagi yang lalu lalang di jalur tersebut. Hal ini juga menjadikan perekonomian masyarakat menjadi hidup dengan adanya warung-warung singgah, penginapan serta transaksi jual beli lainnya. Warung-warung dan tempat-tempat penginapan ini terlihat masih sangat sederhana. Perkonomanian

masyarakat baru mampu untuk menutup kebutuhan hidup sehari-hari.

Dari observasi awal yang dilakukan pada tanggal 11 April 2019, diketahui, bahwa lebih dari 1.000 orang yang lalu-lalang di PLBN Entikong setiap harinya. Sebagian besar mereka adalah pelintas batas dari Indonesia ke Malaysia, diperkirakan lebih dari 70 persen. Sementara jumlah penduduk Kecamatan Entikong, menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, mencapai 18.166 jiwa pada 2017. Ini belum termasuk adanya orang-orang yang menginap sementara untuk waktu cukup lama. Selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau telah menjadikan 4 kecamatan di sekitar Entikong sebagai kecamatan perbatasan, yakni: Kecamatan Kembayan, Beduwai, Sekayam, dan Entikong.

Semenjak PLBN selesai dibangun tahun 2016, ada beberapa perubahan sikap perilaku masyarakat yang cukup signifikan, terutama sikap bangga sebagai bangsa Indonesia. Sikap bangga sebagai bangsa Indonesia inilah yang merubah perilaku-prilaku yang akan merugikan bangsa, terutama dalam masalah keamanan.

Saat ini, peneliti menyaksikan sendiri pembangunan yang sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah di kawasan Entikong dan daerah-daerah menuju Entikong, seperti pembangunan jalan, pelebaran, marka jalan dan membuat dua jalur serta lampu-lampu penerangan. Sejumlah bangunan megah juga telah dan sedang dibangun seperti gedung perkantoran,

tempat penginapan atau mess, pertokoan, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Wilayahnya mulai di tata sedemikian rupa, sehingga ada pengurusan-pengurusan yang telah dilakukan.

Ke depan, tentunya pembangunan kawasan PLBN Entikong ini akan memberikan dampak yang besar terhadap semua bidang, terutama bidang perdagangan dan keamanan sebagai hal yang paling penting. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas di rumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut bagaimana dampak dari pembangunan kawasan PLBN Entikong terhadap perdagangan dan keamanan wilayah Indonesia ? dan apa strategi yang cocok untuk dikembangkan dalam pembangunan kawasan PLBN Entikong agar berdampak terhadap perdagangan dan keamanan wilayah Indonesia?

KAJIAN TEORI

A. Teori Pengembangan Wilayah

1. Teori Lokasi Pendekatan Pasar (Losch)

Teori ini melihat persoalan dan sisi permintaan (pasar). Lokasi penjual sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen. Makin jauh dari pasar, konsumen enggan karena biaya transportasi tinggi. .

2. Teori Polarization Effect dan Trickle Down Effect (Hirschman)
- Dalam teori ini berpendapat bahwa perkembangan suatu wilayah tidak terjadi secara

bersamaan. Dalam teori ini terdapat sistem polarisasi perkembangan suatu wilayah yang kemudian akan memberikan efek ke wilayah lainnya.

3. Teori dari Ir. Sutami tahun 1970 Pembangunan infrastruktur yang intensif untuk mendukung pemanfaatan potensi sumber daya alam akan mampu mempercepat pengembangan wilayah. Perkembangan wilayah tergantung dari sumber daya alam yang terdapat di daerah tersebut, karena pada umumnya wilayah dengan pusat industri akan menarik masyarakat untuk datang karena potensi lapangan pekerjaan terbuka luas.

Perdagangan Lintas Batas (PLB) adalah perdagangan secara khusus yang dilakukan antara penduduk dua negara yang berbatasan dengan nilai tertentu. Hal ini merupakan perlakuan khusus yang diberikan pada masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan untuk memberikan kemudahan akses dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari serta pemasaran produk yang di produksi dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Untuk perdagangan lintas batas antara Indonesia dengan negara tetangga, terdapat batas nilai perdagangan yang diberlakukan. Nilai perdagangan perbatasan untuk Indonesia dan Malaysia untuk perdagangan lewat perbatasan Darat : MYR 600/bulan/orang, sedangkan

untuk perdagangan lewat perbatasan laut : MYR 600/sekali pelayaran/orang.

Pasca Perang Dingin, isu *human security* baru mulai mendapat perhatian dari masyarakat luas di seluruh dunia. *Human security* juga ikut mengalami pergeseran sejalan dengan kemunculannya di dunia internasional. Konsep keamanan dari *human security* mengalami perubahan dari isu-isu militer dan politik menjadi fokus terhadap permasalahan dan kondisi yang terjadi dalam individu dan masyarakat dan pergeseran dari *national security* pada masa Perang Dunia I dan II, menjadi *human security*. *United Nations Development Program* (UNDP) dalam *Human Development Report* 1994 merupakan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pertama yang memperkenalkan konsep *human security*. Badan PBB berpendapat bahwa konflik yang terjadi saat ini lebih banyak terjadi di dalam negara dibandingkan dengan konflik antarnegara.

Konsep *human security* lebih bersifat universal. Artinya, konsep keamanan ini tidak hanya terbatas pada sebuah negara saja, namun berlaku untuk umum dikarenakan ancaman bisa datang kepada siapa saja, tanpa memandang negara mana manusia tersebut berada. Apabila sebuah peristiwa telah sampai mengancam keamanan nasional suatu negara, maka dapat dikategorikan sebagai *Human Security*. Karena dari ancaman keamanan nasional, bukan tidak

mungkin akan meluas hingga mencapai lingkup global.

Dalam kerangka berpikir ini dicoba jelaskan bagaimana argumentasi jika Kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong di bangun, dengan melihat kepada pengalaman, penelitian yang ada sebelumnya, dan teori-teori tentang Pengembangan Kawasan dan Teori Human Security yang dipakai dalam penelitian ini.

Maka terlebih dahulu mengumpulkan data-data tentang keadaan sebelum Kawasan PLBN Entikong dibangun, dan kemudian mengumpulkan data-data setelah kantor PLBN Entikong dibangun, serta keadaan saat ini, dan kemungkinan keadaan yang akan datang jika pembangunan selesai dilaksanakan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang dirancang untuk memperoleh informasi untuk mengungkap berbagai kasus di daerah kawasan Entikong yang berkaitan dengan perdagangan dan keamanan yang sudah atau yang sedang terjadi. Penelitian ini difokuskan pada dampak yang ditimbulkan dari pembangunan kawasan PLBN Entikong terhadap perdagangan dan keamanan di wilayah Indonesia serta strategi yang cocok untuk diterapkan dalam pembangunan kawasan tersebut ke depannya.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dari

berbagai sumber, sementara Pengumpulan data utama dalam penelitian ini menggunakan teknik: observasi nonpartisipasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan, yaitu :1) Tahap editing, dan 2) Kategorisasi, sementara untuk menentukan keabsahan data adalah dengan: *kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.*

TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS

Saat ini telah dibangun berbagai fasilitas di Kecamatan Entikong baik oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat yang berskala besar diantaranya: a.) Pembangunan Perumahan Taman Perbatasan Indah Entikong. b) Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), c) Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong. d) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Entikong. e) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Entikong. f) Jalan batas kabupaten Entikong – Suruh Tembawang. g) Pembangunan Pasar Tradisional Entikong. h) Balai Latihan Kerja (BLK) Entikong. i) Pembangunan perkantoran stasiun karantina Ikan, Tumbuhan dan Kesehatan.j) Pembangunan sarana dan prasarana Bea dan Cukai Entikong (perbatasan). k) Stasiun RRI Perbatasan Entikong. l) SMPN 4 Satu Atap Serangkang. m) Mess Terpadu di Suruh Tembawang. n) Mess Terpadu Kecamatan Entikong. o) Gedung Pertemuan Umum Kecamatan

Entikong. p) Jaringan seluler Telkomsel di Suruh Tembawang dan Badat. q) Jembatan gantung di Suruh Tembawang dan Pala Pasang. r) Kampus STKIP Melawi Cabang Entikong. s) SPBU BBM di Kecamatan Entikong. t) Rencana pembangunan dryport Entikong.

Kecamatan Entikong yang berada di kawasan Perbatasan Antar Negara merupakan wilayah yang sangat strategis menyangkut banyak aspek diantaranya:

1. Secara geografis terletak pada jalur kawasan perbatasan.
2. Berbatasan langsung dengan Negara Bagian Serawak (Malaysia Timur).
3. Terletak pada jalur Trans Borneo yang menghubungkan Serawak, Sabah dan Brunai Darusalam.
4. Memiliki PPLB Entikong yang merupakan satu-satunya Pelabuhan Darat yang resmi di Indonesia sebagai Pintu Gerbang keluar masuk ke/dari Serawak, Sabah dan Brunai Darusalam.

Dengan selesai dibangunnya PLBN Entikong di tahun 2016, aktifitas perdagangan legal menjadi semakin meningkat cukup signifikan. Namun peningkatan aktifitas perdagangan legal tersebut, belum tentu berpengaruh terhadap pengurangan aktifitas perdagangan ilegal, karena ada banyak jalur tidak resmi (jalan tikus) yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk melakukan aktifitas ilegal seperti: perdagangan barang dan jasa, perdagangan orang (*Human*

Trafficking), narkoba dan obat-obat terlarang, dan lain sebagainya.

Berdirinya gedung PLBN yang megah, serta didukung oleh berbagai pembangunan infrastruktur dan berbagai fasilitas lainnya telah menjadikan orang banyak berkunjung ke wilayah ini untuk berbagai keperluan, termasuk sebagai tujuan wisata, karena mengunjungi daerah perbatasan suatu negara tidak bisa dilakukan di semua wilayah Indonesia. Jika saja pembangunan kawasan ini terus dilanjutkan, dengan infrastruktur dan penyediaan berbagai fasilitas yang baik, kawasan Entikong, khususnya di sekitas PLBN Entikong, akan menjadi salah satu objek wisata pilihan masyarakat. Ini tentunya akan memberikan masukan bagi pemerintah dan pemerintah daerah jika diberikan kesempatan untuk ikut mengelola kawasan ini.

Selama ini, berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari sejumlah informan di lapangan menyatakan bahwa, daerah kurang dilibatkan dalam pembangunan kawasan ini, baik itu masyarakatnya, pemerintah daerah, maupun kalangan perguruan tinggi. Hal ini menyebabkan adanya pandangan-pandangan negatif dari sejumlah kalangan terhadap pembangunan kawasan ini. Pandangan-pandangan negatif tersebut antara lain: ada yang mengatakan bahwa pembangunan ini sudah salah arah, tidak berpihak kepada rakyat, proyek oriented dari pemerintah pusat, sudah gagal duluan karena tidak berpengaruh terhadap ekonomi dan tingkat

kesejahteraan masyarakat, serta tidak memperdulikan kearifan lokal.

Perkembangan wilayah tergantung dari sumber daya alam yang terdapat di daerah tersebut, karena pada umumnya wilayah dengan pusat industri akan menarik masyarakat untuk datang karena potensi lapangan pekerjaan terbuka luas. Di sini terlihat betapa pentingnya kearifan lokal tersebut. Sumber daya alam masyarakat di sekitar Entikong adalah dari hasil pertanian, yang sampai saat ini belum ada usaha dari pemerintah untuk memberdayakannya.

Demikian pula halnya dengan permasalahan keamanan dan bahkan pertahanan, sejumlah kalangan menganggap tidak ada pengaruh yang signifikan. Bahkan ada yang berpendapat, aktifitas ilegal justru semakin meningkat di jalur-jalur tidak resmi (jalan tikus) semenjak selesai dibangunnya PLBN. Demikian pula adanya warga negara Indonesia terutama yang tinggal di desa atau di dusun- dusun yang terisolir, yang jauh dari kawasan Entikong, telah berpindah ke wilayah Malaysia. Mereka berpindah ke Malaysia karena lokasi tempat tinggal mereka jauh dan tidak bagusnya akses jalan menuju Entikong. Mereka butuh membeli barang kebutuhan sehari-hari, butuh akses untuk menjual hasil pertanian mereka dengan cepat, butuh membeli pupuk, bibit dan makanan ternak, butuh berobat atau membawa anggota keluarga mereka yang sakit ke rumah sakit, butuh sekolah atau pendidikan anak yang memadai,

dan lain sebagainya. Untuk mencapai Entikong mereka harus mengeluarkan biaya yang besar.

Sementara menurut komandan PAMTAS, disintegrasi atau berpindahnya kewargaan negara masyarakat di sekitar Entikong bukanlah permasalahan serius karena jumlahnya tidak seberapa. Permasalahan masyarakat adalah masalah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sepanjang itu terpenuhi, tidak ada masalah dengan mencintai tanah air. Sesuai dengan Konsep keamanan nasional, yang berubah dari *state center security* kepada *people centered security*, artinya untuk memperkuat suatu bentuk pertahanan haruslah terfokus terlebih dahulu kepada masyarakatnya. Masyarakat yang kuat, yang kebutuhan hidupnya terpenuhi dengan baik, maka masyarakat itu akan menjadi modal utama keamanan dan pertahanan suatu bangsa.

Konsep keamanan *human security* mengalami perubahan dari isu-isu militer dan politik menjadi fokus terhadap permasalahan dan kondisi yang terjadi dalam individu dan masyarakat dan pergeseran dari *national security* menjadi *local/regional security*. Konsekuensinya, keamanan ditingkat regional bisa dikerjasamakan antar negara yang berdekatan, karena kebutuhan akan rasa aman adalah kebutuhan bersama tanpa memandang bangsa dan kewarganegaraan manapun. Persoalan keamanan di daerah perbatasan seperti wilayah Entikong dan

Tubedu Malaysia dapat dikerjasama antar penjaga keamanan kedua negara.

Mengacu kepada Teori Lokasi Pendekatan Pasar (Losch), yang melihat persoalan dan sisi permintaan (pasar). Lokasi penjual sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen. Makin jauh dari pasar, konsumen enggan karena biaya transportasi tinggi. Maka yang terjadi saat ini di Entikong adalah: adanya masyarakat yang berada jauh dari pusat pengembangan kawasan dan tidak adanya akses jalan yang bagus untuk mencapainya. Oleh karena itu peneliti berpendapat, dalam pengembangan kawasan Entikong, jangan hanya membangun jalan dari pusat kabupaten atau propinsi menuju PLBN saja, tetapi yang harus diprioritaskan adalah bangunlah jalan-jalan dari desa atau dusun-dusun yang ada di sekitarnya untuk menuju Entikong. Sesuai dengan teori di atas, masyarakat harus didekatkan dengan lokasi pasar atau pusat pertumbuhan, yakni dengan cara membangun akses jalan yang bagus. Hal ini tentunya juga akan mencegah disintegrasi bangsa.

Dalam Konsep Perdagangan Lintas Batas (PLB) disebutkan bahwa perdagangan secara khusus yang dilakukan antara penduduk dua negara yang berbatasan dengan nilai tertentu. Hal ini merupakan perlakuan khusus yang diberikan pada masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan untuk memberikan kemudahan akses dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari serta pemasaran produk yang di produksi dalam rangka meningkatkan

taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Konsep ini masih perlu dipertahankan, karena masyarakat Indonesia di daerah perbatasan Entikong masih memiliki ketergantungan yang tinggi dengan negara tetangga Malaysia. Sebagian besar kebutuhan sehari-hari masyarakat diperoleh dari berbelanja di daerah Malaysia, terutama dari Tubedu.

Hal ini sangat membantu masyarakat, karena jika mereka berbelanja di wilayah Indonesia, seperti di Sanggau (ibukota Kabupaten) atau di Pontianak (ibukota Propinsi), perjalanannya cukup jauh dan menghabiskan biaya transportasi yang cukup besar. Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, yakni di daerah Tubedu tempat membelanjanya orang-orang Indonesia, tersedia hampir semua kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat dan dengan harga yang lebih murah.

Sejumlah pihak berpendapat bahwa kebijakan pembatasan nilai maksimal belanja 600 ringgit (lebih kurang 2,2 juta) per bulannya perlu untuk direvisi kembali. Kebijakan tersebut tertuang dalam *Border Trade Agreement* (BTA) yang dibuat tahun 1970. Kebijakan tersebut perlu segera direvisi kembali agar sesuai dengan situasi kekinian di daerah perbatasan Entikong. Mungkin hal ini ada benarnya, mengingat sering terjadi masyarakat pemegang kartu BTA tersebut menjual kepada pihak tertentu, karena merasa tanggung atau terlalu sedikit untuk berbelanja ke Malaysia.

Akhirnya kartu tersebut dijual oleh masyarakat kepada pihak pedagang. Pihak pedagang akan berbelanja dalam partai yang lebih besar, dan kemudian dijual lagi di kawasan Entikong dengan harga yang lebih tinggi.

Namun menurut peneliti, peninjauan kembali atau menaikkan nilai maksimal/ batas atas belanja perlu dipertimbangkan secara matang, karena akan dapat berdampak terhadap semakin derasnya masuk barang-barang dari Malaysia. Alhasil impor kita dari Malaysia justru melonjak. Hal ini semakin kontra produktif dengan kebijakan menaikkan nilai ekspor.

PENUTUP

Pembangunan kawasan PLBN Entikong yang sedang dilakukan dengan cukup pesat, setelah kantor PLBN selesai diresmikan dan mulai beroperasi sejak tahun 2016 yang lalu, secara umum berdampak kepada peningkatan perdagangan legal dan situasi keamanan di sekitar kawasan PLBN Entikong. Namun dampak tersebut belum berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Pembangunan fisik berupa kantor PLBN, Terminal Darat Internasional dan sejumlah infrastruktur lainnya adalah merupakan strategi yang sangat tepat, namun harus diikuti dengan pembangunan sumber daya manusia dan kearifan lokal lainnya. Strategi pembangunan jalan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah pembangunan jalan dari desa dan dusun-

dusun terisolir menuju ke kawasan PLBN Entikong, dimana sampai saat ini belum tersentuh. Masyarakat harus diberikan keyakinan bahwa pembangunan itu adalah untuk mereka, dan mereka akan berperan dalam kawasan yang baru dikembangkan tersebut. Hal ini akan menumbuhkan *Human Security*.

Disarankan kepada pemerintah pusat sebagai pelaksana pembangunan kawasan PLBN Entikong agar lebih meningkatkan peran masyarakat lokal; anggota masyarakat, aparat pemerintah daerah dan akademisi setempat dengan program-program yang lebih memperhatikan kearifan lokal serta pemberdayaan masyarakat sejak awal sampai memastikan peran masyarakat setelah pembangunan itu selesai nantinya.

Daftar Pustaka

Buku-buku

Adisasmita, Rahardjo. 2008.

Pengembangan Wilayah :

Konsep dan Teori. Yogyakarta :

Graha Ilmu.

Anggoro, Kusnanto. 2005. *Reformasi Sektor Keamanan, Kewenangan Negara, dan Partisipasi Publik*. Jakarta: Propatria Institute

Anisiewicz, Renata dan Palmowski, Tadeusz. 2014. *Small Border Traffic and Cross-border Tourism*

Magenda, Burhan D. 2008. *Penyiapan Pertahanan Negara Ditinjau Dari Strategi Ketahanan Nasional*. Jakarta: FISIP UI.

Muhammad, Farouk. 2008. *Polri dalam Sistem Pertahanan dan*

- Keamanan*, Makalah Seminar IODAS. Jakarta.
- Mukhtar, Keamanan Nasional: *Antara Teori dan Prakteknya di Indonesia*. 137 Propatria Institute. 2010.
- Mukhtar, Sidratahta. 2005. *Manajemen Keamanan Negara I dan II: Perspektif Kamdagri/Kepolisian*. Makalah FGD Propatria Institute: Jakarta.
- Nawawi, Hadari. (2005). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Perwita, Anak Agung Banyu. 2006. *Pengantar Rekam Jejak Proses Security Sector Reform Indonesia 2000-2005*. Jakarta: Propatria Institute.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.
- Tarigan, R. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Jurnal dan Hasil Penelitian**
- Basuki, J (2005), *dalam Majalah Interaktif IWI, Vol 2, Kompetensi Widyaiswara*.